

# RISALAH KEBIJAKAN

## PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF : MEWUJUDKAN LAYANAN KOMPRHENSIF BAGI ANAK DAN KELUARGA RENTAN DI KOTA MAKASSAR

Layanan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak seharusnya menyediakan layanan dari layanan yang sifatnya pencegahan, identifikasi awal dan intervensi termasuk respon cepat dan terintegrasi.

Sejak 2014, Pemerintah Kota Makassar telah memiliki kebijakan dan program layanan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Namun kesenjangan dalam penerapan kebijakan dan pelaksanaan program masih menjadi tantangan sehingga layanan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak masih kurang cepat dan tidak tuntas menyelesaikan kasus.

Untuk itu, diperlukan upaya untuk layanan anak yang integratif untuk memastikan layanan yang komprehensif, efektif, dan efisien.

### BERAGAMNYA MASALAH KERENTANAN PADA ANAK

Berdasarkan hasil Analisis Basis Data Terpadu (BDT) Kota Makassar tahun 2015, menggambarkan situasi kerentanan yang dimiliki oleh anak beragam, dari 137932 anak, terdapat 1.777 (1.28%) anak dengan

tiga atau lebih masalah. Mereka adalah kelompok anak-anak yang dikategorikan dalam kerentanan tinggi. Sedangkan yang memiliki dua kerentanan atau dikategorikan memiliki kerentanan sedang berjumlah 36771 (26.66%) anak dan anak dengan kerentanan rendah atau memiliki satu kerentanan adalah 99.384 (72.05%).



Lebih lanjut, hasil penjangkauan yang dilakukan terhadap 1440 anak pada bulan Desember 2017- Januari 2018, di 18 Kelurahan 4 Kecamatan Kota Makassar, menggambarkan hal yang sama seperti di atas, dimana seorang anak dapat memiliki beragam masalah kerentanan. Misalnya dari 20 anak yang sudah menikah, 18 anak sudah putus sekolah. Dari 77 orang anak yang diasuh oleh kerabat

seperti nenek/kakek/paman/bibi, 16 anak teridentifikasi mengalami penelantaran. Dari 81 anak yang berisiko terpapar kekerasan, 15

anak juga mengalami eksploitasi ekonomi dan 42 anak juga mengalami penelantaran.

**TABEL 1. HASIL PENJANGKAUAN PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATIF**

<b>Gambaran anak rentan di Kota Makassar***</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Total</b>
Anak dengan disabilitas	18	23	41
Anak dengan penyakit kronis/serius	30	21	51
Anak dengan HIV/AIDS	2		2
Anak tidak sekolah/putus sekolah	319	164	483
Anak bekerja	152	47	199
Anak menikah atau sudah pernah menikah	4	6	20
Anak tanpa identitas (NIK, AKTE, NIK & AKTE)	285	187	429
Anak yang diasuh oleh nenek atau kakek atau kakek dan nenek	42	35	77
Anak dengan masalah perilaku (Kesulitan belajar, merokok, kecanduan games online, terlibat dalam pergaulan berisiko, mencuri)	194	45	239
Anak yang berisiko terpapar kekerasan	33	48	81

\*\*\*Hasil Penjangkauan PPKAI/PKSAI di 18 Kelurahan di 4 Kecamatan Desember 2017 – Januari 2018

Selain masalah kerentanan tersebut di atas masih banyak lagi masalah kerentanan pada anak yang belum terdeteksi antara lain kerentanan anak akan HIV, penyakit kusta dan lain-lain yang memerlukan pengamatan secara sistematis.

### **JALAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN ANAK**

Anak adalah aset bangsa. Namun, kondisi kerentanan pada anak dapat menghambat kesempatan suatu bangsa untuk meraih keuntungan dari bonus demografi termasuk Kabupaten Gowa. Dalam kurang dari sepuluh tahun, banyak daerah di Indonesia, dapat memiliki kesempatan untuk memaksimalkan investasi pada pembangunan sumber daya manusia bila berhasil menurunkan angka ketergantungan (Adioetomo, 2011). Kesempatan ini akan terlewatkan jika Kabupaten Gowa tidak dapat memberi peluang

terbaik bagi generasi mendatang dengan cara mencegah mereka dari menanggung beban kemiskinan dan kerentanan.

Untuk merespon masalah kesejahteraan dan perlindungan anak sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Kota Makassar merespon masalah ini menjadi salah satu tujuan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Kota Makassar. RPJMD juga menyebutkan bahwa pengembangan sinergi multi pihak menjadi strategi dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berbagai upaya dan program dilakukan untuk dapat mengatasinya. Namun penerapan kebijakan dan pelaksanaan program masih menjadi tantangan. Layanan untuk kesejahteraan anak masih kurang cepat dan tidak tuntas dalam menyelesaikan kasus karena program-program tersebut masih bersifat sektoral, belum terintegrasi dan reaktif.

Sebagai upaya untuk mengatasi kerentanan anak sedini mungkin dan meningkatkan sinergitas dalam mewujudkan kesejahteraan anak, maka dibentuklah Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) atau di tingkat nasional disebut Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 tahun

2016. PKSAI berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan untuk deteksi dini kerentanan atau pencegahan melalui layanan penjangkauan kelompok berisiko hingga respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu. Layanan diselenggarakan secara terintegrasi antara layanan kesejahteraan dan perlindungan anak.

**TABEL 2. KOMITMEN KUAT PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MELALUI PENYELENGGARAN PPKAI/PKSAI KOTA MAKASSAR TELAH MENUNJUKKAN HASIL BERDASARKAN 6 KOMPONEN PKSAI**

No	Komponen	Indikator Pencapaian
1	Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Peraturan Walikota tentang Pembentukan PPKAI untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang mengatur tentang kelembagaan termasuk standar operasional prosedur.</li> <li>■ Surat Keputusan Walikota mengenai tim pembina dan tim teknis PPKAI</li> <li>■ Draft Keputusan Walikota tentang focal points PPKAI/PKSAI</li> </ul>
2	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sudah ada Surat Keputusan Walikota mengenai tim inti PPKAI/PKSAI yang terdiri dari keterwakilan dari Perangkat Daerah/instansi terkait, LSM, Peguruan tinggi dengan Dinas Sosial sebagai Koordinator Sekretariat.</li> <li>■ Struktur dalam PPKAI/PKSAI juga sudah ada dan tertuang dalam SOP.</li> <li>■ Sudah ada sekretariat PPKAI/PKSAI yang sementara bersatu dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA).</li> </ul>
3	Mekanisme Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sudah memiliki SOP yang mengatur penyelenggaraan layanan, penerapan manajemen kasus yang dimulai dari identifikasi, perencanaan dan pelaksanaan, hingga terminasi dan pemantauan pasca layanan</li> <li>■ Ada layanan pengaduan dan petugaspengaduan di setiap sektor yang menjadi penghubung untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan layanan.</li> </ul>
4	Rentang dan jenis layanan (primer, sekunder, tersier) yang ingin disediakan dalam layanan yang terpadu	Di tahun 2017, tercatat 52 kasus anak yang direspon. Penjangkauan anak rentan juga sudah dilakukan di 18 Kelurahan 4 Kecamatan Kota Makassar.
5	Sumber Daya Manusia	Sekretariat memiliki sumber daya manusia sebagai sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koordinator sekaligus supervisor</li> <li>■ Penerima pengaduan dan registrasi</li> <li>■ Pekerja Sosial</li> <li>■ Petugas data</li> </ul>
6	Management Data	PPKAI/PKSAI memiliki hasil analisa Basis Data Terpadu 2017 sebagai data dasar kesejahteraan anak yang dapat digunakan untuk perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan layanan.

## APA YANG PERLU SEGERA DILAKUKAN?

Kesejahteraan anak adalah kebutuhan yang mendesak dan mendasar karena terlambatnya dukungan dan respon dapat berpotensi munculnya masalah di masa depan pada masa kecil dan dewasa. Oleh karena itu, memperkuat penyelenggaraan PPKAI/PKSAI perlu segera dilakukan. Berikut rekomendasi Untuk penguatan PPKAI/PKSAI:

- Menyusunan program kerja layanan kesejahteraan anak integratif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemberi layanan dan rujukan.
- Memperkuat mekanisme kerjasama dan koordinasi lintas sektor pemberi layanan dan rujukan. Kepemimpinan yang kuat dapat mendorong semua sektor untuk memprioritaskan penanganan masalah anak dengan cepat.
- Mengembangkan sistem manajemen data dan informasi yang komprehensif mengenai kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Meningkatkan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas. Menambah jumlah pekerja sosial profesional dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani berbagai kasus kekerasan seksual, diversifikasi, menangani konflik, perawatan anak-anak rentan, keterampilan pengasuhan, konseling, dan lainnya.
- Peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam melakukan pelayanan primer dan identifikasi dini. Hal penting lain yang juga sangat mendesak untuk diperhatikan adalah meningkatkan kesejahteraan TKSK dan sakti peksos melalui penyediaan transportasi/lumpsum untuk memberikan layanan di daerah yang jauh dan terpencil.
- Melibatkan dan memperkuat pemerintah desa untuk meningkatkan layanan pencegahan dan penanganan masalah kerentanan.
- Penyediaan anggaran operasional layanan anak integratif di Dinas Sosial, dan OPD terkait lainnya.